

**ARSITEKTUR RUMAH DI KAWASAN CAGAR BUDAYA TROWULAN
(STUDI PEMUKIMAN MAJAPAHIT ABAD KE-14 M)**

RINA ARMINTIA SANI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
e-mail: armintia07193@gmail.com

Aminuddin Kasdi

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pusat kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Di kecamatan Trowulan terdapat puluhan situs seluas hampir 100 kilometer persegi berupa bangunan, temuan arca, gerabah, dan pemakaman peninggalan Kerajaan Majapahit. Penelitian ini merupakan upaya untuk merekonstruksi arsitektur rumah di kawasan cagar budaya Trowulan sebagai situs Majapahit. Rekonstruksi rumah tersebut adalah rumah pada abad ke-14 M. Kondisi artefak serta situs peninggalan kerajaan Majapahit yang dapat ditemui hingga abad ke-21 sangat memberikan informasi dalam penelitian ini. Akan tetapi, artefak serta situs peninggalan kerajaan Majapahit banyak yang rusak karena alam.

Latar Belakang masalah diatas menghasilkan rumusan masalah (1) Bagaimana struktur ibukota Majapahit pada abad ke-14 M, (2) Bagaimana pola pemukiman di Majapahit pada abad ke-14 M, Bagaimana arsitektur bangunan rumah di situs Trowulan sebagai situs Majapahit. Langkah yang digunakan pada metode penelitian adalah heuristik yaitu pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder terkait pemukiman serta arsitektur rumah pada abad ke-14 M, kritik yaitu tahap untuk menelaah sumber yang telah ditemukan, interpretasi yaitu tahap melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan dari sumber baik primer maupun sekunder, historiografi yaitu tahap penyajian hasil laporan penelitian dalam bentuk tulisan dengan penulisan sejarah.

Rumah-rumah yang ada di Kota Majapahit pada masa itu beragam, mungkin keberagaman tersebut berdasarkan status sosial masing-masing pemilik rumah. Pada masa itu rumah-rumah tertata rapi dan indah. Keindahan tersebut karena di halaman rumah terdapat berbagai bunga Keindahan dari rumah-rumah pada masa Majapahit juga terlihat dari kuatnya tiang-tiang rumah, berukir indah dan berwarna-warni. Kakinya berbahan dari batu merah yang bergambar beraneka lukisan. Genting atap rumah-rumah juga menarik perhatian akan keindahannya. Selain itu, beberapa bahan yang digunakan dalam membangun rumah adalah batu berwarna merah, saat ini disebut dengan batu bata.

Kata Kunci: Kerajaan Majapahit, arsitektur, dan cagar budaya Trowulan

Universitas Negeri Surabaya
Abstract

The Majapahit Kingdom Center is located in Trowulan, a sub-district of Mojokerto District, East Java, Indonesia. In the district Trowulan there are dozens of sites covering nearly 100 square kilometers of buildings, statues, pottery, and burial relics of Majapahit Kingdom. This research is an attempt to reconstruct the architecture of the house in the Trowulan cultural preserve as a Majapahit site. The reconstruction of the house is a house in the 14th century AD The condition of the artifacts and sites of the Majapahit kingdom that can be found until the 21st century is very informative in this study. However, artifacts and relics of Majapahit kingdom sites are damaged by nature.

Background of the above problem produces the formulation of the problem (1) How the structure of the capital of Majapahit in the 14th century AD, (2) How the pattern of settlements in Majapahit in the 14th century AD, How to architecture home in the Trowulan site site Majapahit. The steps used in the research method is the heuristic of the collection of primary and secondary sources related to settlement and the architecture of the house in the 14th century AD, the criticism is the stage to examine the sources that have been found, the interpretation of the stage of doing analysis of the facts found from Both primary and

secondary sources, historiography is the stage of presentation of research reports in the form of writing with the writing of history.

The existing houses in Majapahit City at that time vary, perhaps the diversity is based on the social status of each homeowner. At that time the houses are neat and beautiful. The beauty is because in the yard there are various flowers. The beauty of the houses in the Majapahit also visible from the strong poles of the house, beautifully carved and colorful. His legs are made of red stone painted with various paintings. The roof tiles of the houses also attracted attention to its beauty. In addition, some of the materials used in building a house are red stones, now called bricks.

Keywords: Majapahit Kingdom, architecture, and cultural preserve Trowulan

PENDAHULUAN

Trowulan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Trowulan terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang. Trowulan terletak di jalan raya yang menghubungkan Surabaya-Solo. Di kecamatan Trowulan terdapat puluhan situs seluas hampir 100 kilometer persegi berupa bangunan, temuan arca, gerabah, dan pemakaman peninggalan Kerajaan Majapahit.

Berbagai peninggalan pada masa Majapahit disimpan di Pusat Informasi Majapahit (PIM), yang biasa disebut dengan Museum Trowulan.¹ Pembangunan semacam gudang penyimpanan sederhana yang akhirnya berkembang menjadi Museum Trowulan. Upaya tersebut bertujuan untuk mencegah penjarahan dan pencurian artefak dari situs Trowulan. Museum Trowulan menyimpan banyak koleksi temuan arkeologi dari seluruh Jawa Timur, mulai dari era raja Airlangga, Kediri, hingga era Singhasari dan Majapahit.

Berdasarkan pada bukti penggalian yang terdapat di daerah Trowulan, dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut merupakan tempat yang penting pada masa kerajaan Majapahit. Para peneliti berpendapat bahwa letak ibukota Majapahit berada di daerah Trowulan. Trowulan sebagai ibukota Majapahit tercantum dalam kakawin *Nagarakretagama* oleh Prapanca serta beberapa sumber lainnya.² Sebagai ibukota kerajaan, kawasan tersebut memiliki peran penting sebagai pusat kerajaan. Sebagai ibukota, di daerah itu menjadi pusat kegiatan sosial, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan. Dalam kawasan Trowulan sebagai ibukota Majapahit terdapat situs-situs peninggalan yang hingga saat ini dapat dijumpai, seperti Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Kedaton, Candi Menak Jingga, Gapura Bajang Ratu, Gapura Wringin Lawang,

Makam Putri Cempa, Kolam Segaran, Situs Watu Umpak, Makam Troloyo, Candi Jedong, dan Situs Sentonorejo.

Trowulan sebagai ibukota merupakan pusat pemerintahan. Oleh karena status Trowulan sebagai ibukota, maka di kawasan tersebut terdapat bangunan keraton, tempat-tempat suci, tempat penghadapan, serta pemukiman rumah rakyat. Uraian mengenai keraton terdapat dalam *Nagarakrtagama* pupuh 8-12. Pupuh 8-12 menguraikan seluk beluk ibukota kerajaan, dari tempat bersemayam baginda sampai para abdi dan para pembesar kerajaan. Uraian Prapanca dalam *Nagarakrtagama* tentang ibukota sangat menarik perhatian. Pemaparan yang sangat teliti adalah sebagai pujian tidak langsung terhadap baginda Hayam Wuruk.³ Berdasarkan keterangan *Nagarakrtagama* terdapat suatu pola pemukiman yang terbagi-bagi berdasarkan status sosial serta fungsi dari masing-masing bangunan.

Kebutuhan pokok manusia pada dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan. Kebutuhan akan papan merupakan kebutuhan manusia atas tempat untuk berlindung dari kondisi alam berupa iklim setempat ataupun berlindung dari binatang buas. Masyarakat membutuhkan bangunan yaitu rumah. Pada rumah tersebut terdapat seni, yaitu arsitektur. Arsitektur adalah: (1) Seni atau ilmu bangunan, termasuk perencanaan, konstruksi dan penyelesaian dekoratif; (2) Sifat karakter atau langgam bangunan; (3) Kegiatan atau proses membangun bangunan; (4) Bangunan-bangunan; (5) Sekelompok bangunan.⁴

Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Jawa. Majapahit disebut sebagai kerajaan Hindu-Jawa karena agama yang berkembang pesat di Majapahit, khususnya

³ Slamet Muljana, *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit* (Yogyakarta: LKiS, 2005) hlm. 41.

⁴ http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/1473_pp1007004.pdf diakses tanggal 26 Februari 2014 pukul 06.25 WIB. *Arsitektur dan Pengembangannya di Indonesia*. Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu teknik arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Parmono Atmadi pada rapat Senat terbuka Universitas Gajah Mada tanggal 19 November 1981 di Yogyakarta.

¹ I Made Kusumajaya, *Mengenal Kepurbakalaan Majapahit di Daerah Trowulan* (Surabaya: Dinas Pariwisata Daerah Jawa Timur) hlm. 35.

² Agus Aris Munandar, *Ibukota Majapahit: Masa Kejayaan dan Pencapaian* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008) hlm. 72-78.

kerabat kerajaan, adalah agama Hindu beraliran Siwa. Terdapat empat aliran keagamaan di Majapahit, yaitu Siwa, Brahma, Wisnu, dan Budha. Pemeluk Brahma hanya sedikit, sehingga aliran tersebut tidak dimasukkan dalam *tripaksa*. Diantara ketiga aliran yang termasuk dalam *tripaksa*, agama Siwa memiliki pengikut yang paling banyak karena kedudukannya sebagai agama resmi sebagai agama kerajaan Majapahit. Kebudayaan Hindu, yang muncul akibat dari ajaran agama, berakulturasi dengan kebudayaan Jawa asli di pedesaan.

Tata masyarakat Majapahit mengikuti konsep Hinduisme. Konsep dari tata masyarakat berdasarkan Hinduisme adalah terdapat penggolongan masyarakat dalam empat lapisan yang disebut warna atau juga biasa disebut kasta. Empat warna tersebut meliputi brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Pada tata masyarakat Majapahit juga terdapat golongan selain keempat golongan tersebut yaitu *dasyu* (*candala*, *mleccha*, dan *tuccha*).⁵

Kekuasaan tertinggi di Majapahit terletak di tangan raja. Seorang raja merupakan kepala negara Majapahit, yang pergantian kekuasaannya melalui garis keturunan. Jabatan pemerintahan setelah raja terdapat para *tanda*. Para *tanda* adalah pegawai pemerintahan, masing-masing diberi sebutan atau gelar sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Para *tanda* Majapahit dapat dibagi atas tiga golongan, yakni golongan *rakryan*, golongan *arya*, golongan *dang acarya*. Para *tanda* tersebut juga disebut *priyayi*. *Priyayi* bersasal dari kata *para yayi* (para adik), yang dimaksud adalah adik dari raja.⁶

Golongan *priyayi* sebagai kelompok sosial memiliki ciri-ciri tertentu, yang dengan jelas menunjukkan perbedaan dengan kelompok sosial lainnya, terutama kelompok sosial dari rakyat kebanyakan. Ciri-ciri yang membedakan itu tidak hanya berupa adat sopan-santun dan bahasa, tetapi juga berupa hal-hal yang berwujud konkrit, seperti bentuk rumah tempat kediaman, pakaian, gelar pada nama dan sebagainya. Dari bentuk rumah, pakaian, dan gelar beserta namanya dengan sepintas lalu dapat diidentifikasi *kepriyayan* seseorang. Keadaan sosial-ekonomi yang lebih baik daripada keadaan sosial-ekonomi rakyat kebanyakan dan juga posisi politiknya menunjang golongan *priyayi* untuk menyelenggarakan tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal golongan sosial lainnya. Begitu pula pada rumah yang menjadi tempat tinggal, tingkat kebangsawanan dan

tingkat kepangkatan pada pemerintahan menentukan bentuk dan struktur bangunan tempat tinggal itu.⁷

Usaha untuk meneliti arsitektur rumah pada masa kerajaan Majapahit telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada awalnya dilakukan antara lain oleh W. F. Stutterheim yang membahas mengenai gambaran keraton Majapahit berdasarkan pada keterangan *Negarakertagama* pada pupuh 8 hingga pupuh 12 dan dikomparasikan dengan konsep keraton yang ada pada kerajaan di Jawa dan di Bali. Karya Stutterheim tersebut berjudul *De Kraton Van Majapahit*.

METODE

Dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan tentang arsitektur rumah di kawasan cagar budaya Trowulan abad Ke-14 M. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau secara kritis. Kajian dan pembahasan pada penulisan ini dilakukan dengan metode deskriptif dan komparatif atau perbandingan. Penelitian dengan berdasarkan metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan penulisan ilmiah dengan suatu kegiatan yang objektif, sistematis, dan logis. Langkah-langkah dalam metode sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Tahap pertama adalah heuristik. Heuristik merupakan proses mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang diperlukan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Sumber-sumber sejarah tersebut meliputi sumber tertulis seperti: Nagarakrtagama, Pararaton, dan prasasti-prasasti. Sumber sejarah yang dipakai peneliti tidak hanya terbatas pada sumber tertulis melainkan juga sumber berupa peninggalan arkeologis yang terdapat di kawasan cagar budaya Trowulan seperti bangunan candi, patung, relief pada candi, patung, batu nisan dan kepurbakalaan Islam. Selain sumber-sumber tersebut, peneliti juga mencari sumber-sumber dari buku-buku dan artikel hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti.

Sumber sejarah pada penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Terdapat beberapa sumber primer yang telah didapatkan oleh peneliti. Sumber primer tersebut meliputi prasasti-prasasti yang telah dibukukan dalam Tatanegara Madjapahit ditulis oleh Prof. H. Muhammad Yamin; penafsiran Nagarakrtagama oleh Theodore G. Th. Pigeaud yang telah dibukukan dengan judul *Java in The 14th. Century A Study of Cultural History: The Nagarakrtagama by Rakawi Prapanca of*

⁵ Slamet Muljana, *op. cit.*, hlm. 235-236

⁶ Sartono Kartodirdjo, dkk. *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 3-4

⁷ Sartono Kartodirdjo, dkk., *op. cit.*, hlm. 26-27

Majapahit, 1365 A.D. I-V; catatan-catatan Cina yang telah diterjemahkan oleh W.P. Groeneveldt dalam bukunya yang berjudul *Historical Notes on Indonesia and Malaya: Compiled From Chinese Sources*; dan foto-foto relief candi Jawi, candi Jago, candi Tegowangi, candi Surawana, candi Penataran dan relief candi yang terdapat di Museum Trowulan.

Sumber sekunder yang diperoleh antara lain buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan judul maupun tema yang diambil. Sumber sekunder tersebut terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh Slamet Muljana dan Agus Aris Munandar. Buku yang ditulis oleh Slamet Muljana yaitu *Tafsir Sejarah Nagarakretagama*, buku *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit*, dan buku *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Buku yang ditulis oleh Agus Aris Munandar meliputi *Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad ke-14 – 19*, buku *Ibukota Majapahit: Masa Jaya dan Pencapaian*, dan buku *Tak Ada Kanal di Majapahit*. Sumber sekunder untuk arsitektur tradisional meliputi buku *Architecture of Bali: A Source Book of Traditional and Modern Forms* yang ditulis oleh Made Wijaya; buku *Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Timur* yang ditulis oleh tim dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya; buku *Pola Struktural dan Teknik Bangunan di Indonesia: Suatu Pendekatan Arsitektur Indonesia Melalui Pattern Language* secara konstruktif dengan contoh arsitektur Jawa Tengah yang ditulis oleh Heinz Frick.

Tahapan selanjutnya adalah kritik. Pada tahapan tersebut terdapat dua kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern merupakan pengujian terhadap otentikitas, asli, turunan, palsu, serta relevan atau tidaknya suatu sumber. Kritik intern yaitu pengujian terhadap isi atau kandungan sumber. Tujuan kritik adalah untuk menyeleksi data menjadi fakta. Pada tahap kritik sumber ini peneliti menggunakan ilmu bantu filologi dan paleografi dalam menguji sumber yang berupa tulisan, yakni kakawin Nagarakretagama, serat Pararaton dan beberapa prasasti. Sumber sejarah yang berupa benda non-tulis, seperti relief pada candi-candi di Jawa Timur yang berkaitan dengan pola pemukiman masyarakat Majapahit dan bangunan di kawasan cagar budaya Trowulan sekitar abad ke-14 M, diuji dengan menggunakan ilmu bantu arkeologi.

Tahapan selanjutnya ialah interpretasi. Pada tahap interpretasi sejarawan mencari saling hubung antar berbagai fakta yang telah ditemukan. Proses pengusutan penelitian hubungan intrinsik antar fakta dalam sejarah disebut colligation. Fakta-fakta yang telah diusut hubungannya hingga jelas keterkaitannya yang satu dengan yang lainnya disebut fakta yang koheren

(coherence). Pada tahap interpretasi, penulis berupaya menghubungkan fakta-fakta bertujuan agar fakta-fakta tersebut dapat berbicara.

Tahapan yang terakhir yaitu historiografi. Hasil penelitian disajikan dalam bahasa yang mudah dan sesuai dengan kaidah penulisan. Tulisan yang kronologis juga disajikan oleh peneliti didalam hasil penelitian. Pada tahapan historiografi, peneliti akan menyajikan berupa tulisan sejarah yang berjudul “Arsitektur Rumah di Kawasan Cagar Budaya Trowulan (Studi Pemukiman Majapahit Abad Ke-14 M)”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang pada mulanya hanya sebuah desa kecil yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Desa Majapahit terletak di lembah Sungai Brantas dan di sebelah tenggara Kota Majakerta, daerah Tarik. Pada tahun 1292, tempat tersebut merupakan hutan belantara, penuh dengan pohon-pohon maja seperti kebanyakan tempat-tempat lainnya di lembah Sungai Brantas. Kitab Pararaton dan Kidung Wijayakrama menyebutkan bahwa orang-orang Madura datang membangun pemukiman di hutan Tarik dengan nama desa Majapahit. Orang-orang Madura, yang sengaja dikirim ke daerah tersebut oleh adipati Wiraraja dari Sumenep, hutan itu berhasil ditebangi untuk dijadikan ladang yang kemudian dihuni oleh orang-orang Madura dan orang-orang pendukung kerajaan Singasari.

Penyerahan hutan Tarik kepada Raden Wijaya merupakan hasil lobi politik antara Wiraraja dengan Jayakatwang, yang saat itu adalah raja kerajaan Kediri. Sebagai bahan pertimbangan Jayakatwang memberikan daerah tersebut adalah Raden Wijaya, atas nama Singasari, harus menyerah dan tunduk kepada kerajaan Kediri. Penyerahan daerah yang bersifat segera dan kurang dari satu tahun kepada orang yang pernah menjadi lawan dalam politik dan militer, menunjukkan bahwa penyerahan hutan Tarik adalah sebuah hasil lobi politik. Raden Wijaya menyampaikan usul untuk membuat daerah Tarik menjadi hutan perburuan Raja Jayakatwang.

Daerah Tarik yang dahulunya hanya sebuah desa yang bernama Majapahit, setelah penobatan raja Kertarajasa Jayawardhana, menjadi pusat pemerintahan kerajaan baru yang bernama kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada saat itu wilayahnya hanya meliputi daerah kerajaan lama Singasari, hanya sebagian saja dari Jawa Timur. Namun sepeninggal Ranga Lawe pada tahun 1295, atas permintaan Arya Wiraraja sesuai dengan janji Sanggramawijaya, kerajaan Majapahit dibelah menjadi dua. Bagian timur yang meliputi daerah Lumajang diserahkan kepada Wiraraja. Demikianlah pada akhir abad 13, kerajaan Majapahit hanya meliputi daerah Kediri, Singasari, Janggala (Surabaya) dan Pulau Madura.

Pada pemerintahan raja Jayanegara, lebih tepatnya setelah perang Lumajang tahun 1316, daerah Lumajang bergabung lagi dengan Majapahit seperti yang tercatat pada piagam Lamongan. Perang Lumajang tersebut timbul akibat laporan Mahapati kepada sang prabu bahwa Empu Nambi sedang mempersiapkan rencana pemberontakan di Lumajang. Mahapati adalah seorang pembesar yang sangat akrab dengan sang prabu dan bernafsu besar untuk menjadi patih amangkubumi. Sang prabu percaya terhadap Mahapatih, lalu mengirimkan tentara ke Lumajang di bawah komando Mahapati. Tentara Majapahit berhasil menghancurkan benteng Pajarakan dan Ganding. Pada perang tersebut Nambi beserta para pembesar Majapahit yang waktu itu berada di Lumajang dibunuh oleh tentara Majapahit yang dikomando Mahapati. Setelah perang Lumajang tersebut, Mahapati diangkat menjadi patih amangkubumi menggantikan Empu Nambi.

Wilayah Majapahit berangsur meluas, terutama sejak tahun 1331. Pada tahun 1331, Majapahit berhasil menguasai Sadeng, di tepi Sungai Badadung dan Keta di pantai utara, dekat Panarukan. Pada waktu itu wilayah kerajaan Majapahit meliputi seluruh Jawa Timur dan Pulau Madura. Perluasan itu terjadi pada masa pemerintahan Jayanegara dan kemudian dilanjutkan pada pemerintahan Tribhuwana Tunggaladewi.

Perluasan wilayah kerajaan Majapahit menjadi semakin bertambah hingga menjangkau pulau-pulau di luar Jawa, terjadi ketika Gajah Mada menjadi patih amangkubumi. Gajah Mada diangkat sebagai patih amangkubumi Majapahit pada tahun Saka 1256 (1334 M). Ketika pengangkatan Gajah Mada sebagai patih amangkubumi Majapahit, dihadiri oleh semua pembesar kerajaan. Di hadapan rani Tribhuwana Tunggaladewi dan didengar oleh semua pembesar, Gajah Mada bersumpah: "Jika telah berhasil menundukkan Nusantara, saya baru akan beristirahat. Jika Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik telah tunduk, saya baru akan beristirahat!" Sumpah Palapa tersebut merupakan program politik Nusantara yang akan dilaksanakan Gajah Mada.

Wilayah Majapahit sebelum tahun 1334 hanya meliputi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pulau Bali belum termasuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit, meskipun terletak di dekat Jawa, karena nama Bali masih disebut dalam Sumpah Palapa sebagai salah satu wilayah yang masih akan ditundukkan. Program politik Nusantara dilaksanakan sesudah tahun 1334 sampai kira-kira tahun 1357. Batas akhir perluasan wilayah tersebut didasarkan atas kegagalan Gajah Mada untuk menundukkan Sunda, yang juga mengakibatkan pemberhentian sementara Gajah Mada sebagai patih amangkubumi.

Hasil dari politik Nusantara mengakibatkan kekuasaan Majapahit meliputi wilayah Wwanin (di pantai barat Irian Barat) sampai Langkasuka di Semenanjung Melayu. Negara-negara yang berhasil ditundukkan ternyata jauh lebih banyak daripada yang disebutkan dalam Sumpah Palapa tahun 1334. Daerah-daerah di luar Jawa yang telah dikuasai Majapahit pada pertengahan abad ke-14 diberitakan dalam Negarakretagama pupuh 13 dan 14. Daerah-daerah tersebut meliputi:

1. Di Sumatra: Jambi, Palembang, Dharmasraya, Kandis, Kahwas, Siak, Rokan, Mandailing, Panai, Kampe, Haru, Temiang, Parlak, Samudra, Lamuri, Barus, Batan, Lampung.
2. Di Kalimantan (Tanjung Pura): Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Singkawang, Tirem, Landa, Sedu, Barune, Sukadana, Selundung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutei, Malano.
3. Di Semenanjung Tanah Melayu (Hujung Medini): Pahang, Langkasuka, Kelantan, Saiwang, Nagor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah, Jerai.
4. Sebelah timur Jawa: Bali, Badahulu, Lo Gajah, Gurun, Sukun, Taliwang, dompo, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makasar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar (Saparua), Solor, Bima, Wandan (Banda), Ambon atau Maluku, Wanin, Seran, Timor.

Pemerintahan negara bawahan di seberang lautan berbeda dengan pemerintahan negara bawahan di Jawa. Di Jawa terdapat sebelas negara bawahan, masing-masing diperintah oleh raja, dan lima daerah atau provinsi yang disebut mancanagara, masing-masing diperintah oleh juru pangalasan atau dipati. Sebelas daerah bawahan tersebut meliputi Daha, Wengker, Matahun, Lasem, Pajang, Paguhan, Kahuripan, Singasari, Mataram, Wirabhumi, Pawanuhan. Negara-negara bawahan di Jawa tersebut diperintah oleh raja-raja bawahan Majapahit, yang mempunyai tali kekerabatan dengan raja Majapahit. Nagara adalah wilayah yang diperintah oleh raja. Nama ibukotanya dijadikan nama wilayahnya.

Tempat-tempat lainnya yang tidak diperintah oleh raja dibagi menjadi lima bagian berdasarkan kiblat, yakni utara, selatan, timur, barat, dan tengah, masing-masing diperintah oleh seorang menteri amancanagara, juga disebut dengan juru pangalasan. Juru pangalasan diangkat oleh raja Majapahit berdasarkan jasa-jasanya, dan dianugerahi gelar tumenggung atau adipati. Mentri amancanagara merupakan wakil raja di daerahnya masing-masing dan mempunyai kekuasaan penuh di daerahnya.

Susunan pemerintahan negara-negara bawahan dan anjuru mengambil pola pemerintahan pusat di Majapahit. Di negara-negara bawahan terdapat patih, tumenggung, demung, ranga, kanuruhan dan sebagainya, seperti di Majapahit. Patih di Majapahit biasa disebut dengan nama patih amangkubhumi atau patih seluruh negara.

Patih negara bawahan dan daerah mempunyai tanggung jawab langsung dalam pemerintahan di daerah. Wilayah daerah dibagi dalam beberapa bagian, yang masing-masing dipimpin oleh wedana. Satu kewedanaan dibagi dalam beberapa kelompok desa, masing-masing dipimpin oleh akuwu. Tiap pakuwuhan terdiri dari beberapa desa, masing-masing dipimpin oleh buyut atau ketua desa.

Stratifikasi Sosial

Di kerajaan Majapahit terdapat beberapa pembagian lapisan-lapisan masyarakat. Diferensiasi dan stratifikasi sosial kerajaan Majapahit jauh lebih sederhana daripada masyarakat industri pada masa modern. Peranan sosial dan status yang menyertainya adalah jelas suatu fenomena kultural. Agama dan pemerintahan pada masyarakat Majapahit memegang peranan yang tidak dapat diabaikan, terutama keduanya berkaitan dalam pembagian lapisan sosial di Majapahit.

Seperti yang telah diketahui bahwa agama kerajaan Majapahit adalah Hindu-Buddha dan adanya perpaduan budaya dengan India, mengakibatkan munculnya sistem kasta sebagaimana yang ada di India. Seperti yang telah tercantum dalam Nagarakretagama pupuh 81 mengenai caturwarna (empat kasta). Akan tetapi, adanya kasta-kasta itu hampir tidak sesuai dengan realitas sosial yang ada dan itu hanya suatu hiasan teoretis dalam literatur istana. Status-status yang didapatkan karena keturunan ada tendensi untuk tetap dipertahankan, akan tetapi dengan mengalami perubahan-perubahan tertentu dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Di dalam sistem kelas sosial di masyarakat Majapahit, posisi seseorang dapat berubah karena suatu usaha.

Puncak dari lapisan masyarakat Majapahit adalah raja. Kewibawaan yang dimiliki oleh raja dan bentuk-bentuk upacara membantu memperlihatkan posisinya yang mulia dan tinggi, dan raja diperlakukan sebagai orang memuja dewa. Jabatan raja dianggap mempunyai fungsi sebagai pusat masyarakat dan kosmos.

Keluarga raja merupakan tingkat yang tertinggi setelah raja. Anggota dari keluarga raja semuanya mendapatkan hak atas kehormatan yang khusus dan berhak menuntut kebaktian dari rakyat. Seorang bangsawan istana yang menurut kelahirannya dekat dengan raja yang sedang memerintah mempunyai status sosial yang tinggi. Keluarga kerabat raja tersebar tersebar di seluruh negeri. Mereka yang termasuk dalam kategori keluarga-keluarga

kerabat raja disebut dengan wargahaji atau sakaparek. Selain bangsawan yang berasal dari dinasti Singasari dan Majapahit, juga terdapat bangsawan yang berasal dari keturunan dinasti-dinasti terdahulu, disebut parawangsa.

Setelah keluarga raja, tingkat lapisan masyarakat berikutnya adalah sederetan pegawai-pegawai tingkat tinggi: tiga orang mantri besar yaitu Hino, Sirikan, dan Halu. Jabatan patih adalah yang paling terkemuka di antara mantri-mantri lainnya. Tumenggung, demang, kanuruhan dan ranga adalah kepala departemen-departemen bagian sipil, sedangkan juru pangalasan adalah kepala bagian militer. Terdapat garis pemisah antara kepegawaian militer-sipil dan kepegawaian pengadilan-religius. Jabatan pengadilan-religius tersebut dikepalai oleh para dharmadyaksa yang dibantu oleh upapati.

Selain pegawai-pegawai tersebut, di istana juga dipekerjakan mantra bhujangga (cendekiawan-cendekiawan), seperti: ahli-ahli hukum, penyair-penyair dan mereka berkecimpung dalam berbagai cabang ilmu. Tugas mereka adalah memberi nasehat-nasehat duniawi dan memberi tuntunan rohani.

Ulama-ulama istana dikepalai oleh dua orang pendeta, seorang dari agama Syiwa dan seorang dari agama Buddha, yaitu yang disebut dengan Syaiwadharmadyaksa dan Buddhadharmadyaksa. Mereka adalah pengawas tertinggi mandala-mandala di daerah yang menjadi milik keluarga-keluarga ulama dari agama masing-masing. Kedua dharmadyaksa itu juga turut hadir dalam sidang-sidang mahkamah pengadilan. Mereka sangat dihormati disegala lapisan dan juga merupakan kelompok yang paling dipercayai raja. Pada keluarga-keluarga tertentu, jabatan mereka berganti secara turun-temurun.

Hamba-hamba raja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pangkat menengah dan pangkat rendah. Hamba-hamba raja tersebut adalah mantri (pembesar-pembesar), para tanda (kepala jawatan), para gusti (kepala-kepala rendah), dan wardyahaji (pegawai-pegawai rendah). Mereka semua termasuk orang istana, tetapi mantri-mantri dan tanda-tanda harus dibedakan dengan gusti-gusti dan wadyahaji. Punggawa kemungkinan masih sanak-saudara raja dari tingkat rendah yang menghambakan diri di istana. Berikutnya adalah bayangkari, yang bertugas sebagai penjaga pintu gerbang dalam lingkungan istana. Bayangkari merupakan pengawal pribadi raja dan juga dibebani atas penjagaan harta benda raja yang paling disayangi, yaitu senjata dan rencana kerajaan. Selain itu juga terdapat empat pasukan pengalasan, yang merupakan seluruh kekuatan militer yang ada di bawah perintah raja.

Kaum bangsawan daerah, yang juga disebut sebagai para mantri akuwu ring pinggir, ditempatkan langsung sesudah para mantri istana dalam hirarki kerajaan dan

disejajarkan dengan bangsawan-bangsawan asing. Sebagai wakil tertinggi kekuasaan raja gubernur (adhipati) kadang-kadang lebih banyak membela kepentingan daerah dan memusuhi kekuasaan pusat, sehingga juga berpotensi untuk memberontak terhadap pusat. Upaya pemerintah pusat dalam meminimalkan terjadinya pemberontakan, pada setiap upacara istana yang diadakan pada tiap tahun para pejabat daerah dan bangsawan daerah harus menghadiri setiap upacara tersebut.

Setelah bangsawan-bangsawan daerah, lapisan pada tingkat berikutnya adalah para ratu, yaitu anggota-anggota keluarga kelas penguasa dari kerajaan tetangga atau anggota keluarga raja-raja asing yang mewakili kerajaan. Para ratu juga hadir pada upacara istana. Kehadiran mereka pada upacara istana tersebut ada hubungannya dengan posisi legal kerajaan mereka di dalam lingkungan kerajaan Majapahit yang menghendaki pernyataan hormat secara formal.

Golongan-golongan sosial di luar kelas yang berkuasa meliputi kaum agama atau apinghay (kaum putih), kaum tani atau anak thani, dan budak atau bhertya. Anak thani dan bhertya beserta kaum bangsawan daerah (akuwu = kepala daerah; anden = bangsawan daerah rendah) merupakan bagian dari penduduk desa. Terdapat perbedaan antara orang perdesaan (pradesa) dengan orang kota-istana (negara), perdesaan lebih dekat pada kebudayaan rakyat dengan tradisi kecilnya, sedangkan kota-istana (negara) lebih dekat dengan tradisi besarnya. Perbedaan cara hidup tersebut merupakan tanda status yang paling nyata antara bangsawan dan penduduk desa.

Kaum bangsawan daerah pada masyarakat Majapahit menjadi faktor yang penting dalam bidang politik dan ekonomi daerah. Kepala daerah mempunyai pengaruh yang kuat di wilayahnya dan ada tendensi untuk menjadi raja-raja kecil. Beberapa diantara akuwu dan anden kemungkinan adalah keturunan penguasa-penguasa kerajaan masa lalu, yang lain mungkin anak keturunan para penerima hadiah tanah yang diberikan oleh raja-raja masa lalu sebagai ganjaran pengabdian mereka pada keluarga raja-raja. Wilayah yang menjadi milik bangsawan daerah tersebar di seluruh negeri, merupakan enclave di wilayah yang luas dari komunitas desa tipe dapur. Sebagian besar dari tanah sima (wilayah dari kaum bangsawan daerah) dalam beberapa hal masih mendapatkan kemerdekaannya. Akuwu memiliki pembantu-pembantu atau pengikut-pengikut yang mengolah tanah untuknya.

Golongan kedua dari penduduk desa meliputi keluarga-keluarga petani bebas (rama) dan anggota-anggota komunitas biasa (dapur) yang diperintah oleh para pengetua buyut. Dapur merupakan bentuk organisasi teritorial asli yang tertua dan penduduknya ialah apa yang dinamakan kulina, yaitu anggota-anggota dari keluarga-

keluarga petani kuno, penduduk asli daerah dan anak keturunan cacal bakal desa. Mereka merupakan penduduk inti desa. Sebagian besar dari orang-orang bebas bertempat tinggal di dapur tersebut. Posisi mereka yang merdeka diperkuat oleh keadaan pada waktu itu, yaitu adanya tanah yang masih melimpah dan tenaga kerja yang sangat sedikit. Migrasi pada waktu itu merupakan tindakan yang efektif untuk melawan tirani dan perbudakan.

Di Majapahit juga terdapat perbudakan. Sekelompok penduduk desa yang tidak bebas di daerah-daerah tumbuh sedemikian pesat sampai jumlahnya melebihi komunitas desa kuno, daerah para bangsawan dan mandala. Orang-orang yang tidak bebas tersebut, baik laki-laki maupun perempuan (bhertyai dan kawula), dikeluarkan dari organisasi sosial asal mereka dan dimasukkan dalam rumah tangga majikan mereka (gusti). Adanya perbudakan terjadi disebabkan oleh mereka tidak dapat membayar denda yang dikenakan sebagai hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan, sehingga orang tersebut beserta keluarganya menjadi budak raja. Majikan mereka berhak untuk menjual mereka secara tunai atau memberikan mereka sebagai jaminan hutang. Selain itu, adanya perbudakan karena mereka mengalami kalah perang sehingga mereka dijadikan budak oleh pemenang perang. Para budak dipergunakan sebagai pekerja paksa di istana atau sebagai petani untuk kepentingan keluarga raja.

Di Majapahit selain terdapat komunitas-komunitas pertanian, daerah-daerah feodal dan mandala-madala juga terdapat komunitas-komunitas yang berdiri sendiri. Komunitas tersebut menjadi tempat tinggal pedagang-pedagang, empu-empu dan tukang-tukang. Tempat-tempat kediaman tersebut dinamakan kalagyan atau kabanyagan, dan merupakan enclave di wilayah pedesaan, sedikit banyak terisolasi dari komunitas-komunitas desa yang menjadi tetangganya. Para empu di kalagyan (pemukiman para empu) bekerja membuat obyek-obyek yang dipergunakan untuk segala keperluan-keperluan agama, baik yang dipakai di istana maupun di tempat-tempat suci yang menjadi milik mandala ataupun yang menjadi milik komunitas-komunitas sekuler atau juga komunitas-komunitas desa.

Pada masyarakat Majapahit juga terdapat golongan-golongan yang didiskriminasi secara sosial, yaitu candala, mlecccha atau tuccha. Golongan wong lembah (orang bawah) merupakan anak keturunan suku-suku tua penduduk asli yang hidup di daerah-daerah yang terisolasi atau anak keturunan budak-budak yang didatangkan karena perdagangan atau karena tawanan perang.

Struktur Ibukota Majapahit

Nagarakretagama yang selesai digubah oleh Mpu Prapanca tahun 1365 M, menguraikan tentang kejayaan Majapahit. Uraian tersebut berisikan tentang kaum kerabat raja, upacara kebesaran di keraton, perjalanan-perjalanan Rajasanagara, berbagai bangunan suci Hindu-Buddha, perburuan raja dan uraian perihal keraton Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389).

Pada bagian uraian tentang keraton Majapahit, yang juga dapat disebut dengan ibukota Majapahit. Mpu Prapanca menyebutkan beberapa mata angin yang dijadikan patokan arah suatu bangunan dalam kompleks pura Rajasanagara. Misalnya yang terdapat pada pupuh 8:1 “kulwan di/dwara waktra mangharapkan lbuh ageng I tngah way edran adalm...” (“di sisi barat menghadap kearah lbuh ageng, di tengahnya terdapat air mengalir dalam...”). Dalam hal tata bangunan atau kompleks bangunan bahkan perkotaan, umumnya mengacu pada sistem atau titik orientasi tertentu. Hampir semua kebudayaan di dunia jika membangun gedung, kompleks istana dan juga perkotaan memiliki arah orientasi yang dijadikan acuannya.

Seperti ibukota pada saat ini, ibukota merupakan pusat dari kegiatan pemerintahan. Begitu pula di Majapahit, dalam ibukota terdapat keraton yang di dalamnya berlangsung kegiatan-kegiatan birokrasi. Keraton, sebagai sarana fisik yang difungsikan sebagai tempat tinggal maupun penyelenggaraan pemerintahan pusat.

Dalam kakawin Nagarakretagama disebutkan bahwa terdapat tanah lapang di pusat Kota Majapahit dekat dengan gugusan bangunan Keraton Rajasanagara yang dinamakan dengan wanguntur dan lbuh ageng berada di sisi barat keraton. Letak wanguntur adalah berada di sisi utara keraton dan merupakan tanah lapang utama. Tradisi adanya tanah lapang di utara keraton diteruskan dengan hadirnya alun-alun pada istana-istana kerajaan Islam di Jawa. Sedangkan lbuh ageng adalah tanah lapang yang terletak di sisi barat istana dan terdapat suatu danau kecil dibagian tengahnya.

Fungsi tanah lapang wanguntur dijelaskan dalam Nagarakretagama antara lain tempat pertandingan watangan, yaitu pertandingan sambal berkuda. Para pemainnya saling mendorong dengan tombak tumpul sehingga ada yang terjatuh dari kuda. Pemenangannya adalah mereka yang bertahan tidak jatuh dari kuda. Selain itu, diterangkan juga adanya bangunan panangkilan tempat para menteri dan para cerdik pandai berkumpul, mungkin untuk menunggu sebelum menghadap raja, atau juga tempat untuk menyaksikan pertandingan watangan. Bangunan-bangunan panangkilan tersebut didirikan di sisi utara wanguntur, sedangkan di sisi timurnya berderet bangunan-bangunan bagi para pendeta Hindu, Budha dan kaum agamawan lainnya. Dalam Nagarakretagama pupuh 8:4 dinyatakan bahwa di sisi timur juga terdapat

bangunan-bangunan suci untuk agama Budha di sisi paling utara. Ada juga bangunan suci bagi pemujaan Siwa di tengah dan di sisi selatannya terdapat bangunan suci Wipra (para pemuja Wisnu).

Sementara itu, di bagian tengah wanguntur terdapat witana yang mungkin dipergunakan untuk raja (Hayam Wuruk) dan keluarganya apabila sedang menonton pertandingan watangan di lapangan wanguntur. Bangunan witana terbuat dari bahan yang cepat rusak, seperti bambu, kayu, ijuk, dan lain-lain. Bentuknya berupa bangunan panggung, mungkin atapnya berbentuk tumpang sebagaimana yang digambarkan dalam relief di kaki Candi Jago dan panil-panil lepas di Candi Suku dalam cerita Sudhamala.

Salah satu hal lain yang menarik untuk dibahas adalah perihal letak tanah lapang di utara keraton tempat tinggal raja dan keraton berada di selatannya. Hal tersebut bukan merupakan suatu kebetulan karena terdapat falsafah yang mendasarinya. Pada masa Majapahit, agama Hindu dan Budha masih dipeluk secara luas di kalangan masyarakatnya. Bukti-bukti arkeologis yang bertahan hingga sekarang menunjukkan bahwa banyak bangunan suci yang didirikan di pelosok-pelosok Jawa bagian timur dengan nafas agama Hindu dan Budha. berdasarkan kenyataan tersebut, muncul asumsi bahwa penataan kota sangat mungkin berlandaskan kepada konsepsi atau ajaran agama Hindu-Budha.

Falsafah umum yang dikenal tentang lapisan kehidupan adalah ajaran Triloka. Ajaran tersebut terdiri dari alam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal makhluk lainnya yang masih terikat nafsu keduniawian dan dinamakan Bhurloka. Alam lapis kedua dihuni oleh manusia-manusia yang telah berhasil lepas dari ikatan keduniawian karena ingin bertemu dengan dewa-dewa disebut dengan Bhuwarloka. Adapun alam tempat persemayaman dewa sebagai makhluk suci dijuluki dengan Swarloka. Demikianlah konsep tentang pembagian tiga alam yang dapat diterapkan dalam berbagai hal, seperti dalam pembagian vertikal bangunan candi, penataan horizontal halaman percandian seperti di kompleks Candi Panataran, pembagian vertikal gunung, penataan pura Bali dan lainnya.

Penataan berdasarkan Triloka tersebut sangat mungkin diterapkan dalam penataan kota sebagai tempat kedudukan raja (penguasa). Presentasi konsep itu dimulai dari alam Bhurloka yang menjelma menjadi pasar. Pada banyak kota di Jawa, pasar diposisikan di sisi utara alun-alun. Pasar sebagai presentasi Bhurloka cukup dapat dipahami sebab manusia yang melakukan interaksi di pasar jelas mempunyai hasrat tertentu, seperti hasrat keduniawian yang nyata untuk memiliki, mendapatkan sesuatu dan mencari makanan, bahkan terjadi juga

ketidakjujuran dan kejahatan. Maka, pasar adalah presentasi yang dirasa sesuai dengan alam bhuwarloka.

Maka, dapat dimengerti apabila di selatan pasar terdapat tanah lapang yang dinamakan alun-alun atau di Kota Majapahit dinamakan dengan Wanguntur. Alun-alun adalah tempat berkumpulnya masyarakat untuk dapat bertemu dengan rajanya. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu, raja akan tampil dan berhadapan langsung dengan rakyatnya. Waktu itu rakyat sengaja datang ke alun-alun untuk dapat menatap langsung sang raja. Alun-alun awalnya dirancang untuk pertemuan antara rakyat dengan rajanya yang dianggap sebagai penjelmaan dewa. Raja dipandang sebagai manifestasi dari kekuatan supernatural dewa. Oleh karena itu, pertemuan dengannya harus mempunyai tempat khusus, yaitu alun-alun. Dengan demikian, alun-alun pada dasarnya adalah presentasi dari dunia Bhuwarloka, dunia orang yang telah meninggalkan hasrat keduniawianya, kecuali satu hasrat, yaitu untuk dapat bertemu dengan dewa.

Lokasi keraton, kedaton, istana, kabupaten, dalem, pakuwaan, puri, atau apapun sebutannya untuk tempat persemayaman penguasa yang berada di selatan alun-alun dapat dijelaskan dalam rangkaian konsep Triloka. Jadi, lingkungan istana sebagai tempat tinggal raja atau penguasa adalah presentasi dari Swarloka. Hal itu yang kemudian dinamakan keraton.

Sekarang dapat dipahami bahwa urutan (1) pasar □ (2) alun-alun □ dan (3) keraton sebenarnya setara dengan konsep Bhurloka, Bhuwarloka dan Swarloka, tetapi dalam susunan horizontal bukan dan dalam penataan vertikal. Pasar adalah simbol tempat tampilnya berbagai hasrat keduniawian, sedangkan alun-alun sebagai simbol tempat orang-orang yang sengaja hendak bertemu dewata (dalam hal ini tampil dalam diri sang raja) dan keraton adalah simbol persemayaman sang raja yang merupakan wujud dari dewata di dunia nyata. Demikianlah penataan tersebut terjadi pada masa awal diciptakannya alun-alun di pusat kota. Alun-alun di zaman Majapahit dinamakan wanguntur karena didasarkan kepada falsafah keagamaan sebagai simbol dari bhuwarloka.

Pada masa perkembangan Islam penataan pasar di utara, alun-alun di tengah dan keraton di selatan tetap terus berlanjut mengikuti pola penataan Kota Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Budha terbesar dan terakhir sebelum merebaknya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, tetapi falsafah dasarnya sudah tidak dipermasalahkan lagi.

Mengenai adanya bangunan masjid di sisi barat alun-alun, seperti yang dijumpai pada penataan kota-kota masa Islam di Jawa, sebenarnya setara dengan bangunan-bangunan suci yang berada di sisi timur alun-alun Keraton Majapahit (wanguntur). Hal ini telah dikemukakan dalam Nagarakretagama pupuh 8:3 bahwa di sisi timur wanguntur terdapat tempat bagi “para pendeta berdiskusi

dan mengadakan pemujaan kepada dewa tersebut tentu masih berada dalam lingkungan wanguntur yang merupakan tataran Bhuwarloka. Di bangunan-bangunan tersebut, para pendeta memperbincangkan perihal ajaran keagamaan, pengabdian dan pemujaan kepada para dewa. Mereka melakukan ini karena belum bersatu dengan dewa-dewa dan masih dalam kehidupan sekarang, namun telah menghilangkan segala hasrat duniawi.

Ketika Islam berkembang diperlukan adanya bangunan masjid sebagai sarana ibadah yang banyak dihadiri oleh pemeluknya. Oleh karena itu, masjid dibangun di sisi barat alun-alun. Hal itu lebih didasarkan kepada prinsip fungsional sebab kalau jemaah yang sholat di masjid tersebut sangat penuh, maka mereka dapat menggunakan alun-alun di sisi timur masjid sebagai tempat untuk melakukan sholat berjamaah.

Berdasarkan uraian kakawin Nagarakretagama kiranya dapat disimpulkan bahwa penataan pasar, wanguntur, dan Kedaton Rajasagaragara agaknya didasarkan kepada konsepsi Triloka. Pada masa Majapahit, konsepsi tersebut dikenal luas karena terbukti diacu dalam berbagai penataan ruang, seperti pada kompleks bangunan suci, kompleks istana dan juga pembagian vertikal bangunan candi. Adapun dalam masa Islam konsep pembagian tiga area, tanpa dihubungkan dengan ajaran Hindu dan Budha, masih dikenal dan juga dapat dilihat dalam penataan kedaton, kompleks makam, kompleks masjid dan lain-lain.

Struktur Birokrasi Majapahit

Majapahit merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Kepala negara Majapahit adalah seorang raja, yang memperoleh kekuasaan berkat keturunan, kecuali Raja Kertarajasa Jayawardhana. Raja Kertarajasa Jayawardhana merupakan raja pertama Majapahit, yang mendapat kekuasaannya melalui peperangan dengan raja Kediri Jayakatwang. Hak atas tahta kerajaan diberikan kepada putera dan puteri raja, yang lahir dari permaisuri. Jika permaisuri tidak mempunyai putera, hak itu diberikan kepada seorang puterinya. Jika permaisuri sama sekali tidak mempunyai keturunan, maka hak itu akan diberikan kepada keturunan raja, yang lahir dari selir, atau kepada kerabat yang paling terdekat dengan raja.

Setelah dinobatkan sebagai raja, raja Majapahit mengambil nama resmi yang disebut dengan raja abhiseka nama. Misalnya Nararya Sanggramawijaya setelah dinobatkan sebagai raja Majapahit, namanya menjadi Kertarajasa Jayawardhana; Jayanagara setelah penobatannya mengambil nama resmi Sri Sundarapandiyadewadhiswara; Tribhuwana Tunggaladewi mengambil nama resmi Tribhuwana Tunggaladewi Jayawisnuwardhani. Pada beberapa piagam, nama kecil atau garbhopati nama sering disebut bersama-sama

dengan nama resmi raja (abhiseka nama), misalnya Dyah Hayam Wuruk mengambil nama resmi Sri Rajasanagara. Penyebutan-penyebutan Garbhopati nama tersebut seperti yang tercantum dalam piagam Trawulan tahun 1358 dan piagam Sidateka tahun 1323.

Raja Majapahit juga merupakan kepala dalam lingkungan kerabat raja, selain memegang pucuk pimpinan dalam pemerintahan. Tanggung jawab negara sepenuhnya ada di tangan raja. Dalam pelaksanaan pemerintahan, raja dibantu oleh para pejabat dari berbagai bidang. Pejabat-pejabat tersebut diangkat oleh sri baginda raja. Ketika menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan yang penting seperti pengangkatan patih amangkubumi atau pejabat penting lainnya, raja dibantu oleh para kerabat. Hal tersebut dikarenakan urusan negara dalam kerajaan adalah urusan kerabat raja. Sebelum mengambil keputusan mengenai perkara yang penting, sri baginda mengadakan musyawarah dengan para kerabat.

Para kerabat raja disebut dengan Dewan Pertimbangan Agung pemerintahan Majapahit. Pada tahun 1364, Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari 9 orang, termasuk sri baginda. Jumlah keanggotaannya bergantung kepada jumlah anggota kerabat yang ada. Dewan Pertimbangan Agung bersidang setiap kali sri baginda raja akan mengambil keputusan mengenai perkara penting yang menghendaki pendapat dari para kerabat.

Pada zaman Majapahit, para pegawai pemerintahan disebut dengan tanda. Masing-masing tanda memiliki sebutan atau gelar sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Nama-nama gelar pada masa Majapahit banyak disebutkan dalam berbagai piagam. Para tanda Majapahit dapat dibagi atas tiga golongan, yakni golongan rakryan, golongan arya, golongan dang acarya. Berikut adalah uraian penggunaan gelar-gelar tersebut.

1. Para tanda yang berhak menggunakan gelar rakryan atau rake meliputi Mahamantri Kartini (Mahamantri Hino, Mahamantri Sirikan, dan Mahamantri Halu), pasangguhan, sang panca Wilwatikta, Juru Pangalasan, para patih negara bawahan.
2. Para tanda yang berhak menggunakan gelar arya mempunyai kedudukan lebih rendah daripada golongan rakryan dan disebut sesudah sang panca Wilwatikta.
3. Para tanda yang berhak menggunakan gelar dang acarya khusus diperuntukkan bagi para pendeta Siwa dan Buddha yang diangkat sebagai dharmmadyaksa: hakim tinggi, atau upapati: pembantu dharmmadyaksa alias hakim. Jumlah dharmmadyaksa ada dua, yaitu dharmmadyaksa dalam kesiwaan dan dharmmadyaksa dalam kebuddhaan. Sedangkan jumlah upapati hanya lima, semuanya dalam kesiwaan, kemudian ditambah dua upapati ke-

Buddha-an. Sehingga jumlah upapati menjadi tujuh dalam pemerintahan Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasanagara. Golongan dang acarya biasanya disebut sesudah para arya.

Para pemegang jabatan dalam birokrasi Majapahit tersebut dapat dikelompokkan sebagai golongan priyayi. Priyayi bersasal dari kata para yayi (para adik), yang dimaksud adalah adik dari raja. Di daerah Kerajaan Jawa sekarang, Surakarta dan Yogyakarta, yang dinamakan priyayi ialah mereka yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan dan yang nekerja di istana biasanya disebut abdi dalem. Keluarga dan kerabat raja juga disebut priyayi. Untuk membedakan antara priyayi yang bukan keluarga dan kerabat raja, priyayi keluarga dan kerabat raja itu disebut priyayi luhur. Priyayi yang lain disebut priyayi dan priyayi cilik.

Pada buku Kebudayaan Jawa, Kuntjaraningrat mengatakan bahwa pegawai-pegawai pemerintahan sebelum Perang Dunia II dinamakan priyayi. Pada saat itu dibedakan antara priyayi pangrehpraja dan priyayi bukan-pangrehpraja. Golongan priyayi pangrehpraja adalah pejabat-pejabat pemerintah tingkat daerah, yaitu orang-orang terpenting dan paling tinggi gengsinya di antara priyayi lainnya, yang disebabkan sifat kebangsawanan mereka. Golongan priyayi kedua adalah golongan orang-orang terpelajar, yang berasal dari daerah pedesaan atau daerah golongan tiyang alit yang berhasil mencapai kedudukan pegawai pemerintahan melalui pendidikan.

Golongan priyayi sebagai kelompok sosial memiliki ciri-ciri tertentu, yang dengan jelas menunjukkan perbedaannya dengan kelompok sosial lainnya, terutama kelompok sosial dari rakyat kebanyakan. Ciri-ciri yang membedakan itu tidak hanya berupa adat sopan-santun dan bahasa, tetapi juga berupa hal-hal yang berwujud konkrit, seperti bentuk rumah tempat kediaman, pakaian, gelar pada nama dan sebagainya. Dari bentuk rumah, pakaian dan gelar beserta namanya dengan sepintas lalu dapat diidentifikasi kepriyayian seseorang.

Keadaan sosial-ekonomi yang lebih baik daripada keadaan sosial-ekonomi rakyat kebanyakan dan juga posisi politiknya menunjang golongan priyayi untuk menyelenggarakan tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal golongan sosial lainnya. Salah satu lambang kepriyayian tampak pada rumah yang menjadi tempat tinggal. Tingkat kebangsawanan dan tingkat kepangkatan pada pemerintahan menentukan bentuk dan struktur bangunan tempat tinggal itu.

Hubungan antara Struktur Birokrasi dengan Pola Pemukiman di Ibukota Majapahit

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, pemukiman adalah lingkungan hidup di luar kawasan

lindung, baik kawasan perkotaan maupun perkotaan sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Menurut Sinulingga (1999: 187), pemukiman adalah gabungan 4 elemen pembentuknya (lahan, prasarana, rumah dan fasilitas umum) dimana lahan adalah lokasi untuk pemukiman. Kondisi tanah mempengaruhi harga rumah, didukung prasarana pemukiman berupa jalan lokal, drainase, air kotor, air bersih, listrik dan telepon, serta fasilitas umum yang mendukung rumah. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

Pemukiman yang ada di ibukota kerajaan Majapahit terbentuk berdasarkan kelompok birokrasi yang telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya. Pengaruh dari birokrasi pada pemukiman adalah penempatan dari berbagai pejabat pemerintahan dalam keraton. Rumah (tempat tinggal) merupakan bagian dari suatu pemukiman. Rumah saling berkelompok membentuk pemukiman dengan pola tertentu. Pengelompokan pemukiman dapat didasari atas dasar: (1) Kesamaan golongan dalam masyarakat, misalnya terjadi dalam kelompok sosial tertentu antara lain kompleks keraton, kompleks perumahan pegawai; (2) Kesamaan profesi tertentu, antara lain desa pengrajin, perumahan dosen, perumahan bank; dan (3) Kesamaan atas dasar suku bangsa tertentu, antara lain Kampung Bali, Kampung Makasar.

Tata ruang di ibukota Majapahit tidak jauh berbeda dari tata ruang kerajaan-kerajaan berikutnya. Pola tata ruang kerajaan-kerajaan sesudah Majapahit merupakan representasi dari tata ruang pada masa Majapahit. Pada masa Majapahit hingga masa Mataram, alun-alun selalu menjadi bagian dari suatu kompleks keraton. Keraton dalam masyarakat tradisional merupakan pusat pemerintahan dan sekaligus pusat kebudayaan. Sebagai pusat pemerintahan, keraton juga menjadi tempat tinggal raja, maka keraton dianggap sebagai miniatur dari makrokosmos. Wilayah keraton selalu dianggap sebagai wilayah yang sakral bagi masyarakat. Perwujudan sebagai wilayah yang sakral tersebut melahirkan konsepsi ruang dari susunan sebuah keraton.

Pada ajaran brahmana dikenal adanya konsepsi penataan alam semesta secara makrokosmos. Dalam ajaran tersebut dinyatakan bahwa dalam alam semesta berbentuk pipih seperti piringan (cakram), di tengah sebaai pusat alam adalah Gunung Mahameru, yaitu gunung kosmos yang sangat tinggi menjulang. Mahameru berdiri di tengah benua tempat tinggal manusia yang dinamakan Jambhudvipa. Di lereng gunung Mahameru

yang berhutan lebat tinggal kaum brahmana serta para pertapa dan kaum agamawan yang sudah menjauhkan diri dari dunia ramai. Adapun di puncak Mahameru terdapat kota tempat tinggal dewa-dewa yang dinamakan Sudarsana dengan Indra sebagai penguasa tertinggi disana. Di setiap arah dari gunung Mahameru (ada delapan arah mata angin) dijaga oleh dewa-dewa penjaga (Lokapala). Jambhudvipa dikelilingi oleh samudera yang berbentuk cincin. Setelah samudera terdapat rangkaian pegunungan yang mengitari samudera tersebut.

Keraton Majapahit berdasarkan keterangan dalam *Negarakretagama*, di sebelah utara dari kompleks keraton terdapat dua alun-alun. Berbeda dengan alun-alun yang terdapat pada keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta yang alun-alunnya terdapat di sisi utara (lor) dan selatan (kidul). Dua alun-alun di sebelah utara keraton Majapahit disebut Bubat dan Wanguntur. Fungsi kedua alun-alun tersebut agak berbeda. Lapangan Bubat lebih bersifat tidak sakral. Pesta rakyat yang terlaksana setiap satu tahun sekali pada bulan caitra (Maret/April), diselenggarakan di lapangan Bubat. Pada hari ke-3 hingga ke-4 terakhir pertunjukan dan permainan diselenggarakan dengan kehadiran dari raja. Fungsi lapangan Wanguntur lebih sakral. Lapangan Wanguntur terletak di dalam pura raja Majapahit, yang digunakan untuk lapangan upacara penobatan atau resepsi kenegaraan. Pada lapangan Wanguntur terdapat Siti Inggil, serta kompleks pemujaan (kuil Siwa) yang terletak di sebelah Timur dari lapangan Wanguntur. Hal tersebut lebih mirip dengan alun-alun Lor Keraton Yogyakarta atau Surakarta, hanya kompleks pemujaan pada alun-alun Lor diganti dengan masjid yang letaknya di sebelah Barat dari alun-alun.

Tempat tinggal penguasa (keraton) Majapahit, dalam hal ini adalah raja Majapahit berlokasi di sebelah selatan dari lapangan Wanguntur. Tempat tinggal raja tersebut berada di sebelah timur dari kolam segaran. Keraton Majapahit dikelilingi oleh dinding keraton yang berbahkan bata merah. Pada luar keraton, sebelah timur lapangan Wanguntur, terdapat beberapa tempat tinggal dari keluarga raja. Misalnya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu tempat tinggal Raja Wengker dan Rani Daha berdekatan dengan tempat tinggal Raja Matahun dan Rani Lasem. Hal tersebut digambarkan dalam *Negarakretagama* pupuh 12.

Pada *Negarakretagama* pupuh 12 juga memberikan keterangan letak tempat tinggal patih Majapahit, yakni Mahapatih Gajah Mada. Lebih tepatnya letaknya berada di sebelah timur laut dari tempat tinggal raja Majapahit. Berdasarkan penelitian arkeologis, tempat tinggal Gajah Mada diduga berada di sebelah timur Candi Bentar Wringin Lawang. Candi Wringin Lawang adalah sebuah gapura peninggalan kerajaan Majapahit abad ke-14 yang berada di Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten

Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan tersebut terletak tak jauh ke selatan dari jalan utama di Jatipasar, sedangkan pejabat di bawah Mahapatih Gajah Mada, seperti panca ring Wilwatikta juga disebutkan dalam Negarakretagama, namun tidak diterangkan secara jelas.

Pada keterangan Nagarakretagama, sebelah selatan dari tempat tinggal raja (keraton) Majapahit terdapat gedung kejaksan tinggi. Pada sketsa keraton Majapahit menurut Maclaine Pont disebut dengan paseban pajeksan (kadharmmadhyaksan). Paseban pajeksan tersebut ketika pada masa Islam kemudian menjadi alun-alun kidul, seperti pada tata ruang keraton Yogyakarta dan keraton Surakarta.

Di sebelah timur dari lapangan Wanguntur terdapat bangunan suci Siwa. Berdasarkan perbandingan pada Candi Ngetos, sebagai tempat penempatan abu jenazah Hayam Wuruk, lokasi kediaman pendeta yang merawat candi tersebut berada tidak jauh dari lokasi bangunan suci. Jadi, diduga tempat tinggal pemuka agama Hindu-Budha pada masa Majapahit berada di dekat bangunan suci tersebut. Kedekatan tempat tinggal pemuka agama dengan bangunan suci juga seperti pada Candi Kalasan dan Candi Sari.

Identifikasi Bangunan Berdasarkan Fungsinya Bangunan Peribadatan

Dalam Struktur ibukota Majapahit ternyata bangunan suci yang utama berada di sebelah barat dari lapangan Bubut, yaitu Candi Brahu. Bangunan Candi Brahu rekonstruksinya dapat diamati sebagaimana yang terdapat pada saat ini. Diduga di sekitar Candi Brahu banyak terdapat candi-candi kecil. Sisa-sisanya yang sebagian sudah runtuh masih ada, seperti Candi Muteran, Candi Gedung, Candi Tengah dan Candi Gentong. Saat penggalian dilakukan di sekitar candi banyak ditemukan benda benda kuno, semacam alat-alat upacara keagamaan dari logam, perhiasan dari emas, arca dan lain-lainnya.

Dalam cerita rakyat yang hidup di wilayah Trowulan dan sekitarnya, Candi Brahu dipercaya sebagai bangunan suci tempat pembakaran jenazah para raja Majapahit. Oleh karena itu, diberi nama Brahu yang asal katanya dari Brawu□awu atau abu, tentu saja yg dimaksud adalah abu jenazah para raja dan kerabatnya yang dibakar di tempat itu. Bentuk bangunannya menjulang tinggi bertujuan untuk mengantarkan asap pembakaran yang membumbung tinggi menuju kahyangan bersama melenyapnya arwah masuk ke dunia dewa-dewa.

Candi Brahu dan Candi Gentong ditafsirkan bercorak agama Budha. Ciri arsitektur Budha pada bangunan Candi Brahu terdapat di sudut tenggara puncak atapnya yang mempunyai komponen atap berbentuk lingkaran. Kemungkinan bentuk itu adalah bagian dasar dari stupa penghias atap, sama seperti bangunan suci masa

Majapahit yaitu Candi Jawi. Bangunan suci masa Majapahit atapnya tidak hanya berbentuk stupa, tetapi ada juga candi yang bentuknya bercirikan bangunan suci khusus Siwa, seperti Candi Singasari dan Candi Kidal. Atap pada bangunan suci masa Majapahit tidak hanya itu saja, ada juga yang atapnya berbentuk cungkup seperti pada kepurbakalaan Walisongo. Bangunan suci Majapahit yang bertapakan seperti tersebut contohnya Candi Boyolangu, merupakan makam dari Gayatri Rajapadmi. Sebagaimana yang terlukis pada Candi Tegowangi, kemungkinan atap Candi Tegowangi dan Candi Surowono seperti itu juga.

Bangunan Tempat Tinggal Raja

Pada kepercayaan masa Indonesia Hindu-Budha, seorang raja dianggap sebagai titisan dewa, misalnya raja Erlangga sebagai titisan Dewa Wisnu, Ken Arok sebagai titisan Dewa Siwa, Raden Wijaya perwujudan dari Hari dan Hara, serta raja Hayam Wuruk sebagai perwujudan Siwa. Sehubungan dengan kepercayaan tersebut, maka bangunan tempat tinggal raja sebagai tempat tinggal dewa yang ada di dunia. Berdasarkan analogi, perbandingan dengan bangunan-bangunan suci yang juga dianggap sebagai tempat kediaman dewa dari raja yang telah wafat dan sebagai perwujudan dewa, misalnya Candi Boyolangu merupakan makam dari Gayatri Rajapadmi. Selain dapat dijumpai pada Candi Boyolangu, tempat makam para wali juga serupa dengan konsep tersebut, karena para wali dianggap telah bersatu dengan tuhannya (manunggaling kawula gusti). Sebagaimana para wali songo, maka bangunan tempat tinggal raja tidak jauh berbeda dengan tempat tinggal para raja pada masa setelah kerajaan Majapahit, masa Kerajaan Islam.

Pada masa setelah kerajaan Majapahit, sebagaimana yang dapat dilacak pada Keraton Yogyakarta. Perancang bangunan (arsitek) tersebut adalah Sultan Hamengkubuwana I, pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bangunan keraton merupakan suatu kompleks yang terdiri dari bangunan-bangunan dimana masing-masing bangunan mempunyai nama, makna, dan fungsi sendiri-sendiri. Keraton Yogyakarta terdiri dari 9 bagian yaitu: alun-alun utara, sitinggil, kemandhungan atau mandhungan, sri panganti atau sri manganti, Kadhaton, magangan, kamandhungan atau mandhungan, sitinggil, alun-alun selatan.

Kadhaton merupakan bagian tengah. Bagian Kadhaton terdapat pembagian ruangan yaitu Regol Danapratapa, Bangsal Kencana, Tratat Prabayaksa, Prabayaksa, masjid Panepen, Keraton Kilen, Tamanan, gedhongan, Pringgodani. Prabayaksa berasal dari kata praba yang artinya sinar, dan yaksa yang berarti raksasa, sangat besar. Dengan demikian Prabayaksa diartikan sebagai sinar yang sangat besar (raksasa), merupakan sebutan untuk matahari

atau Sang Hyang Surya, sumber 2 kehidupan makhluk di dunia. Dalem Prabayaksa juga disebut Gedhong Prabayaksa atau Bangsal Prabayaksa.

Prabayaksa merupakan bangunan dari bagian keraton. Kedaton mengandung arti sebagai tempat datu, tempat ratu atau raja. Di keraton terdapat tempat untuk penyimpanan benda pusaka, baik pusaka, regalia, maupun benda keramat lainnya. Dalem Prabayaksa menghadap ke timur, yaitu menghadap arah matahari terbit, dan membelakangi arah matahari tenggelam. Model bangunan Dalem Prabayaksa berupa limasan lambang gantung dan disertai emper keliling. Pada bagian tengah Dalem Prabayaksa terdapat pasarean tengah yang membujur ke utara. Di tengah-tengah pasarean terdapat punjen yang berisi empon-empon dan biji-bijian. Pasarean tengah merupakan sesaji bagi Dewi Sri sebagai dewi padi, sebagai lambang rezeki, kemakmuran, dan kesuburan. Oleh karenanya arah hadap pasarean ke arah selatan, menghadap lautan dan membelakangi gunung. Di dekat pasarean tengah diberi sesaji kendhi pratala berisi air sebagai perimbangan Sang Hyang Surya.

Pengamatan mengenai keraton Yogyakarta dapat membantu dalam merekonstruksi bangunan tempat tinggal raja Majapahit. Arsitektur bangunan tempat tinggal raja Majapahit diduga tidak jauh berbeda dengan arsitektur bangunan rumah raja-raja pada masa sesudahnya. Bentuk atap bangunan tempat tinggal raja Majapahit diduga berbentuk joglo, sedangkan ornamen-ornamen bangunan tersebut menggambarkan kemegahan dari seorang raja.

Bangunan Tempat Tinggal Pejabat

Negarakretagama memberitakan mengenai rumah beberapa pejabat Majapahit, namun tidak begitu jelas keterangan tersebut. Negarakretagama hanya menyebutkan bahwa rumah besar, bagus, tinggi serta semua rumah memancarkan sinar warnanya gilang cemerlang. Keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rumah para pejabat memiliki ciri yang berbeda dengan rumah raja dan rumah rakyat kebanyakan. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat perbedaan kemampuan dalam membangun bangunan rumah tersebut. Bangunan tempat tinggal para pejabat diduga atapnya berbentuk atap limas. Kemungkinan terdapat perbedaan juga dalam bentuk atap limas tersebut. Semakin tinggi jabatannya, maka atapnya juga lebih tinggi dari pada atap rumah milik pejabat yang di bawahnya.

Berdasarkan perbandingan dengan tempat tinggal para pembesar (bangsawan) pada masa setelah kerajaan Majapahit, misalnya tempat tinggal bupati, maka tempat tinggal bangsawan masa Majapahit juga tidak jauh dari bangunan tersebut. Sebagaimana susunan tempat tinggal bangsawan tersebut meliputi bangunan induk berada di

bagian paling belakang (dalem), bagian tengah adalah peringgitan dan bangunan bagian depan adalah mandapa/pandhapa. Bagian dalem merupakan tempat kediaman keluarga pejabat, bagian peringgitan merupakan tempat penyimpanan alat-alat keperluan keluarga, sedangkan bagian pandhapa merupakan tempat menerima tamu, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan.

Golongan pejabat (bangsawan) sebagai kelompok sosial memiliki ciri-ciri tertentu, yang dengan jelas menunjukkan perbedaannya dengan kelompok sosial lainnya, terutama kelompok sosial dari rakyat kebanyakan. Ciri-ciri yang membedakan itu tidak hanya berupa adat sopan-santun dan bahasa, tetapi juga berupa hal-hal yang berwujud konkrit, seperti bentuk rumah tempat kediaman, pakaian, gelar pada nama dan sebagainya. Dari bentuk rumah, pakaian dan gelar beserta namanya dengan sebatas lalu dapat diidentifikasi kepriyayaan seseorang.

Keadaan sosial-ekonomi yang lebih baik daripada keadaan sosial-ekonomi rakyat kebanyakan dan juga posisi politiknya menunjang golongan pejabat untuk menyelenggarakan tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal golongan sosial lainnya. Salah satu lambang kepriyayaan tampak pada rumah yang menjadi tempat tinggal. Tingkat kebangsawanan dan tingkat kepangkatan pada pemerintahan menentukan bentuk dan struktur bangunan tempat tinggal itu.

Bangunan yang Bersifat Umum (Ruang Publik)

Bangunan yang bersifat umum (ruang publik) merupakan bangunan yang digunakan untuk segala kalangan. Bangunan ruang publik terdapat beragam bentuk. Berdasarkan pada tinggalan berupa relief-relief candi, terdapat bangunan yang terbuka dengan tiang beragam, ada yang bertiang empat, enam, lima dan delapan. Selain itu, pada relief-relief juga ada bangunan-bangunan yang lantainya ada di atas (disangga) dengan tiang.

Bangunan-bangunan tersebut nampaknya untuk kepentingan umum, misalnya pertemuan warga. Bangunan seperti itu di Bali disebut dengan banjar. Di Bali, bangunan tersebut memiliki dua fungsi sebagai pertemuan dan sebagai adu jago. Bangunan tersebut juga diduga merupakan bangunan gardu yang dipakai oleh petugas keamanan di desa (petugas desa) untuk berjaga, biasanya hanya dipakai pada malam hari. Bangunan tersebut di Jawa disebut dengan cakruk, sebagaimana yang terdapat di Candi Jago. Model bangunan seperti itu sampai saat ini masih ada, biasanya disebut dengan poskamling.

Pembagian Komplek Istana

Istana (keraton) Majapahit terletak di sebelah selatan alun-alun lor (lapangan Wanguntur). Komplek keraton dijaga ketat oleh beberapa penjaga, baik penjagaan pada gerbang kedua serta penjagaan melalui pos jaga dengan Menara yang berada di luar komplek keraton. Adapun fungsi dari keraton merupakan pusat pemerintahan kerajaan dan juga sebagai tempat tinggal raja. Selain tempat tinggal raja, dalam keraton Majapahit juga terdapat residen keluarga.

Pada bagian pinggir dari keraton Majapahit terdapat bangunan-bangunan para pejabat kerajaan. Diduga bangunan-bangunan tersebut adalah ruang kerja bagi para pejabat kerajaan. Bangunan-bangunan tersebut berada hampir mengelilingi keraton Majapahit. Di sebelah utara terdapat paseban, balai yang digunakan untuk menghadap raja. Pada bagian tersebut raja menerima semua rakyatnya atau tamu yang datang untuk menghadap dengan berbagai kepentingan. Setelah paseban, terdapat gerbang penjaga istana (Bhayangkara), yang penjaganya selalu siap siaga dalam menjaga keraton.

Ketika memasuki gerbang kedua, akan langsung berhadapan dengan bangsal penobatan (witana). Pada keraton Yogyakarta, bangsal witana digunakan untuk menempatkan pusaka-pusaka utama keraton pada waktu dilangsungkan upacara penobatan raja dan pada waktu upacara garebeg Mulud tahun Dal (Jawa). Pada sebelah timur balai witana terdapat gerbang pertama istana. Setelah gerbang tersebut, mulailah memasuki bagian inti dari keraton, yaitu tempat tinggal raja serta kerabat raja. Di tengah-tengah ruangan-ruang tempat tinggal terdapat bangunan suci yang juga terdapat gudang harta. Dalam raja berada setelah residen keluarga raja.

PENUTUP

Simpulan

Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang pada awal berdiri hanya sebuah desa kecil yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Pada tahun 1293 M, kerajaan Majapahit mulai berdiri sebagai sebuah kerajaan. Wilayah Majapahit berangsur meluas, terutama sejak tahun 1331. Perluasan itu terjadi pada masa pemerintahan Jayanegara dan kemudian dilanjutkan pada pemerintahan Tribhuwana Tungadewi. Kerajaan Majapahit mengalami perkembangan yang pesat pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada abad ke-14 M.

Letak pusat kerajaan Majapahit berada di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Kecamatan Trowulan terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang. Trowulan terletak di jalan raya yang menghubungkan Surabaya-Solo. Di kecamatan Trowulan terdapat puluhan situs seluas hampir 100

kilometer persegi berupa bangunan, temuan arca, gerabah, dan pemakaman peninggalan Kerajaan Majapahit.

Pada beberapa situs peninggalan Majapahit memberikan gambaran mengenai keadaan masyarakat Majapahit masa itu. Selain berupa artefak, beberapa sumber penulisan pada masa tersebut juga memberikan keterangan mengenai keadaan masyarakat Majapahit. Berdasarkan sumber-sumber sejarah tersebut, arsitektur rumah pada masa kerajaan Majapahit juga dapat direkonstruksi, meskipun masih samar-samar.

Nagarakretagama juga menggambarkan bahwa pada masa itu rumah-rumah tertata rapi dan indah. Keindahan tersebut disebutkan karena pada halaman rumah terdapat berbagai bunga, meliputi bunga tanjung, kesara, campaka dan lain-lainnya. Keindahan dari rumah-rumah pada masa Majapahit juga terlihat dari kuatnya tiang-tiang rumah, berukir indah dan berwarna-warni. Kakinya berbahan dari batu merah yang bergambar beraneka lukisan. Genting atap rumah-rumah juga diuraikan bahwa bersemarak serba meresapkan pandang, menarik perhatian akan keindahannya. Selain itu, beberapa bahan yang digunakan dalam membangun rumah adalah batu berwarna merah, saat ini disebut dengan batu bata.

Rumah-rumah yang ada di Kota Majapahit pada masa itu beragam, mungkin keberagaman tersebut berdasarkan status sosial masing-masing pemilik rumah. Golongan priyayi sebagai kelompok sosial memiliki ciri-ciri tertentu yang menunjukkan perbedaannya dengan kelompok sosial lainnya, terutama kelompok sosial dari rakyat kebanyakan. Salah satu lambang kepriyayian tampak pada rumah yang menjadi tempat tinggal. Tingkat kebangsawanan dan tingkat kepangkatan pada pemerintahan menentukan bentuk dan struktur bangunan tempat tinggal. Oleh karena keberagaman tersebut, pemukiman Majapahit menjadi lebih indah.

Relief-relief candi yang terdapat di Jawa Timur juga menggambarkan beberapa bentuk bangunan-bangunan pada saat itu. Bentuk bangunan tersebut meliputi bangunan bertiang satu, bangunan bertiang empat, bangunan bertiang enam, bangunan bertiang delapan, dan bangunan tertutup. Corak bangunan dengan tiang tanpa dinding diperkirakan adalah bangunan publik, sedangkan bangunan yang tertutup adalah bangunan tempat tinggal. Temuan artefak berupa miniatur rumah yang terdapat di Museum Trowulan juga dapat mewakili bagaimana bentuk bangunan rumah pada masa itu. Miniatur tersebut digunakan sebagai maket dalam perencanaan pemukiman pada masa Majapahit. Pada miniatur rumah, kita dapat melihat variasi atap yang bermacam-macam, ada tajug, gonjong, limasan, dan kampung. Dapat dilihat juga jenis bahan yang digunakan untuk atap, yaitu genteng, sirap, bambu dan ijuk.

Saran

Pada era globalisasi saat ini, seni arsitektur sangat berkembang dengan pesat. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Masing-masing suku memiliki ciri khas dalam bentuk bangunan rumah. Bentuk bangunan-bangunan tradisional pada perkembangannya mulai tergantikan dengan model bangunan kolonial yang lebih modern. Berbeda dengan bangunan kolonial, bangunan-bangunan tradisional tidak dapat bertahan lama karena terbuat dari bahan yang mudah rusak. Oleh karena itu, dengan adanya rekonstruksi bangunan rumah abad ke-14 M dapat memperkaya referensi arsitektur di Indonesia.

Bagi dunia pendidikan, penelitian terkait Arsitektur Rumah di Kawasan Cagar Budaya Trowulan (Studi Pemukiman Majapahit Abad Ke-14 M) dapat memberikan gambaran bagaimana bentuk dari rumah pada masa Kerajaan Majapahit. Generasi muda akan lebih bangga dengan bangsanya apabila mereka mengetahui lebih banyak mengenai bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gottschalk, Louis. 1998. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hermanislamet, Bondan. 1999. *Tata Ruang Kota Majapahit: Analisis Keruangan Bekas Pusat Kerajaan Hindu Jawa Abad XIV di Trowulan Jawa Timur*, Disertasi Universitas Gajah Mada.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. dkk. 1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumajaya, I Made. 2000. *Mengenal Kepurbakalaan Majapahit di Daerah Trowulan*. Surabaya: Dinas Pariwisata Daerah Jawa Timur.
- Muljana, Slamet. 2005. *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit*. Yogyakarta: LKiS.
- Muljana, Slamet. 2006. *Tafsir Sejarah: Nagara Kretagama*. Yogyakarta: LKiS.
- Munandar, Agus Aris. 2005. *Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad ke-14—19 M*. Depok: Komunitas Bambu.
- Munandar, Agus Aris. 2008. *Ibukota Majapahit, Masa Kejayaan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Munandar, Agus Aris. 2013. *Tak Ada Kanal di Majapahit*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Mundardjito dkk., "Pemukiman Masa Majapahit di Situs Trowulan, Mojokerto", Laporan Penelitian Hibah Bersaing IV/2 Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 1996/1997, UI, 1996.
- Pigeaud. *Java in the Fourteenth Century*. The Hague.
- Prioharijono, Maria Rosita. 1987. *Bangunan Tempat Tinggal Pada Relief Candi-Candi Jaman Majapahit*. Skripsi Bidang Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Supratikno. 2011. *Peradaban Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Soekmono. 1981. *Candi Borobudur: Pusaka Budaya Umat Manusia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Th. G. Th. Pigeaud. 1936. *Java In The 14th Century: A Study In Cultural History IV*. M. Nijhoff: The Hague.
- W.P. Groeneveldt. 1960. *Historical Notes on Indonesia and Malaya: Compiled from Chinese Sources*.
- Widagdo, Mario Aditya. 2002. *Kajian Arsitektur Bangunan Majapahit*. Skripsi Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur, Universitas Katolik Parahyangan.
- Albiladiyah, S.I. 2000. *Dalem Prabayaksa merupakan Titik Pusat Bangunan Karaton Yogyakarta*. *Patra-Widya Vol. I No. 3 September 2000*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

SUMBER DARI AKSES INTERNET

- http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/1473_pp1007004.pdf diakses tanggal 26 Februari 2014 pukul 06.25 WIB. Arsitektur dan Pengembangannya di Indonesia.

Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu teknik arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Parmono Atmadi pada rapat Senat terbuka Universitas Gajah Mada tanggal 19 November 1981 di Yogyakarta.

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200844986904856&set=g.582046885173700&type=1&theater>
ter diakses tanggal 20 Februari 2014 pukul 15.00 WIB.

http://fportfolio.petra.ac.id/user_files/81-005/ALUN-ALUN.pdf

Anonim. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Permukiman.

